

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan pembangunan Batam, pertumbuhan penduduk Batam-pun secara perlahan tapi pasti meningkat dan menumbuhkan adanya jasa perkotaan. Oleh sebab itu, di awal tahun 1980-an dipandang perlu adanya pengaturan khusus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, perlu ada lembaga di luar Badan Otorita Batam yang berperan untuk mengatur fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Atas pertimbangan ini, Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34/1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai perangkat dekonsentrasi. Sejak saat itu pula, pengelolaan kawasan Batam melibatkan dua lembaga, yakni Badan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif.

Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kedua peraturan ini selanjutnya dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Halim;2016)

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.(Mulyawan,2010)

Menurut peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001, pajak daerah diklasifikasikan beberapa jenis pajak antara lain pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, pajak parkir.

Tabel 1.1 Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah

| No | Tahun | Bulan | Pajak Restoran | Pajak Reklame | Pajak Hiburan | Pendapatan Asli Daerah |
|----|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2012 | Agustus | 2,210.16 | 342.83 | 1,103.09 | 34,394.55 |
| 2 | | September | 2,110.73 | 365.66 | 1,124.65 | 34,389.31 |
| 3 | | Oktober | 1,141.34 | 346.92 | 1,144.12 | 34,463.53 |
| 4 | | November | 2,470.53 | 347.40 | 1,004.51 | 34,499.17 |
| 5 | | Desember | 3,004.73 | 348.16 | 1,166.86 | 34,481.33 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui secara sepintas bahwa realisasi pendapatan pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan setiap bulan mengalami fluktuasi yang cenderung berbeda di setiap bulannya, pajak restoran pada bulan Desember penerimaan pajak restoran paling tinggi yang terjadi selama 5 bulan terakhir di tahun 2012 sebesar 3,004.73 yang mengalami kenaikan sebesar 534.2 dari bulan sebelumnya pada pajak reklame penerimaan paling tinggi bulan september sebesar 365.66 kemudian mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir bulan desember menjadi 348.16 dan pada pajak hiburan 5 bulan terakhir di bulan desember penerimaan pajak hiburan pada akhirnya kembali mengalami perbaikan kenaikan

sebesar 1,166.86. Terlihat bahwa masih banyaknya restoran, reklame dan hiburan yang belum bayar pajak dan itu mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, kami memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Batam.
2. Penerimaan Pajak Reklame mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Batam.
3. Penerimaan Pajak Hiburan mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Batam.
4. Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada hal di bawah ini :

1. Objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam
2. Variabel yang diteliti adalah Pajak Restoran , Pajak Reklame dan Pajak Hiburan sebagai variabel bebas, dan variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat.
3. Periode yang digunakan pada peneliti ini adalah mulai tahun 2012 akhir 2016.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam ?
2. Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam ?
3. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam ?
4. Apakah pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk kegiatan penelitian.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi pemerintah daerah kota Batam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Karena secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat digunakan perekonomian daerah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi khususnya dibidang Akuntansi dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian serupa pada periode dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu media untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kegiatan perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.